

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKJiP )  
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI/ LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penataan organisasi pengelola pembangunan masyarakat disertai dengan pengembangan berbagai konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan organisasi pembangunan masyarakat desa yang secara khusus sebagai wadah yang diberikan kewajiban untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dijelaskan historis sebagai berikut:

- a. Periode Orde Lama (1950-1965)
  - Kementerian Pembangunan Masyarakat/ 21 Januari – 6 September 1950;
  - Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DKPMD)/ 24 Maret – 9 April 1957;
  - Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) dan Departemen Transkopemada/ 18 Pebruari 1960 – 6 Maret 1963;
  - Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro PMD) menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat PMD)/ 6 Maret 1962 – 13 Nopember 1983;
  - Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen PMD)/ 27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966;
  - Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 24 Pebruari – 28 Maret 1966 .
- b. Periode Orde Baru (1966-1998)
  - Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 23 Maret 1966;
  - Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ 25 Juli 1966 – 19 Oktober 1967;
  - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978.
- c. Periode Reformasi (1998 - saat ini)
  - Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 disesuaikan dengan nuansa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999;
  - Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM);
  - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001;

- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)/ Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat provinsi dibawah tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten, karena penetapan kebijakan otonomi daerah, nomenklatur instansi pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk , maka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

### **TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK**

#### **I. TUGAS POKOK**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **II. FUNGSI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **I. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barangmilik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaanprogram dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertibankantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara danbarang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengantugas dan fungsinya.

b. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerja sama desa.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dankerja sama desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja

samadesa;

3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerja sama desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;

4. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa
- Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.
- Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
  2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
  3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
  4. pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

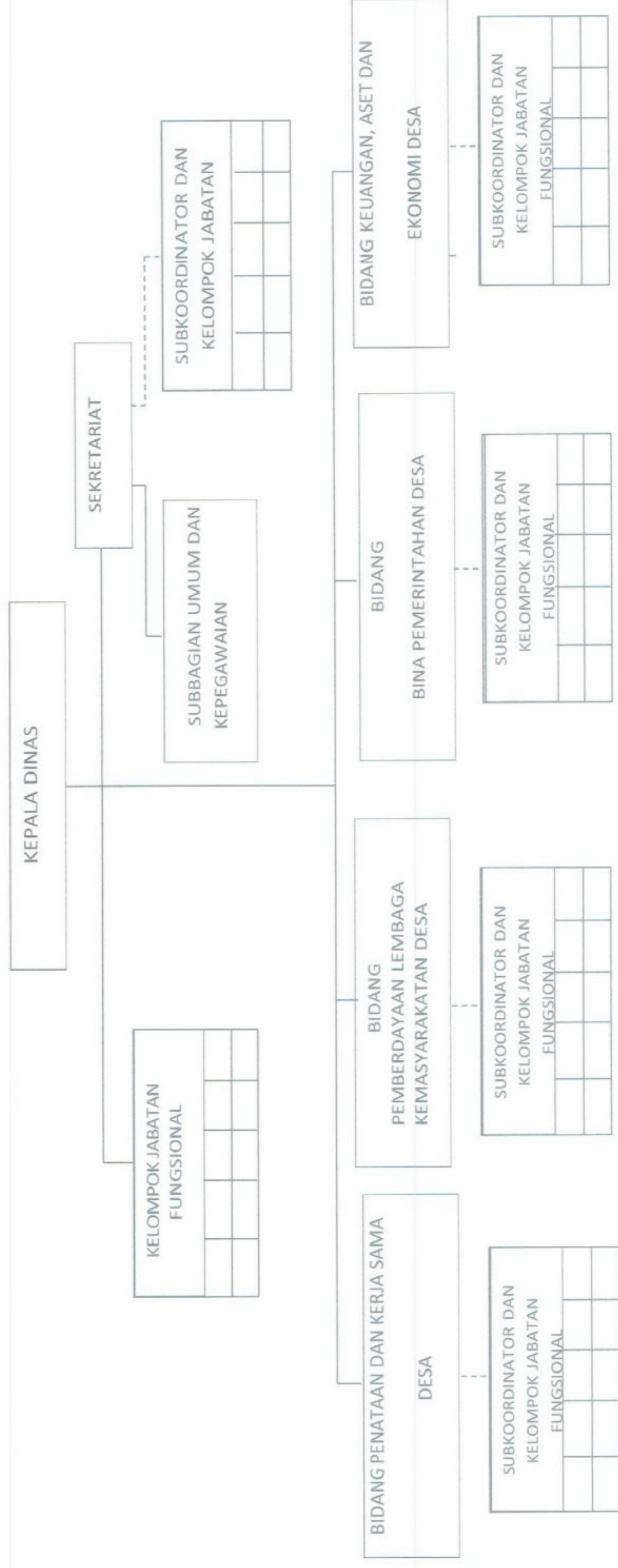
## **II. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**  
**NGANJUK**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



**Jumlah pegawai pemerintah sesuai dengan DUK tahun 2023**

No	Jabatan	Pendidikan terakhir	Pangkat/Golongan	Diklat kepemimpinan	Ket
1	Kepala Dinas	S2	Pembina Utama Muda (IV/c)		
2	Sekretaris Dinas	S2	Pembina Tingkat I (IV/b)		
3	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	S2	Pembina (IV/a)	Diklat kepemimpinan	
4	Kabid Keuangan dan Aset Dan Ekonomi Desa	S1	Pembina (IV/a)		
5	Kabid Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	S2	Pembina (IV/a)		
6	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa	S2	Penata TK I (III/d)		
7	Kasubag Umum	-	-		
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S2	Pembina (IVa)		
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S1	Penata Tingkat I (III/c)		
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S2	Penata Tingkat I (III/d)		
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S1	Penata (III/d)		
12	Analisis Keuangan	S1	Penata (III/d)		



	Pusat dan Daerah Ahli Muda				
13	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	S1	Penata Muda (III/d)		
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	D3	Penata Muda (III/d)		
15	Pengadministrasi Umum	SLTA	Penata Muda (III/b)		
16	Bendahara	S1	Penata Md Tk .I(III/b)		
17	Analisis Pembangunan	S1	Penata Muda (III/a)		
18	Pengadministrasi Keuangan	SLTA	Penata Muda ( III/a)		
19	Analisis Kemasyarakatan	S1	Penata Muda (III/a)		
20	Analisis Desa dan Kelurahan	S1	Penata Muda (III/a)		
21	Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA	Pengatur TK I (II/d)		
22	Pengadministrasi Program dan Perencanaan	SLTA	Pengatur TK I (II/d)		
23	Pengadministrasi Umum	SLTA	Pengatur TK I ( II/d)		
24	Pengadministrasi Keuangan	SLTA	Pengatur TK I(II/d )		
25	Pengadministrasi kepegawaian	SLTA	Pengatur Tingkat I (II/d)		
26	Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA	Pengatur Tk I (II/d)		
27	Pengadministrasi Umum	SLTA	Pengatur TK I (II/d)		
28	THL	15			
	Jumlah	43			

### C. ISU – ISU STRATEGIS ( STRATEGIS ISSUED ) DPMD

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu Strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Belum optimalnya frekuensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mendukung pembangunan;
- Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi aparatur pemerintahan desa dalam menunjang pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat
- Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi dan Misi

Pada prinsipnya Visi adalah gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 menetapkan visi sebagai berikut:

*“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho )”* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut terutama di MISI ke 4 (empat ) yaitu *“MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEHNOLOGI TEPAT GUNA”*

Berdasarkan visi dan misi di atas terdapat faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa;
2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim;
3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap;
4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi;
5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat;
7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan;
8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Program yang kurang tepat sasaran;

2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan;
3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih;
4. Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh;
5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/lemah;
6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah;
7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian;
8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA );
9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### ➤ Tujuan

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana strategis, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”**.

Adapun Indikator Tujuan adalah : Indeks Desa Membangun (IDM)

### ➤ Sasaran

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan “**

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

- a. Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi local ”, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri;
- b. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan*” maka ditetapkan sasaran Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan;

- c. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa*”, maka ditetapkan sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya tata kelola keuangan dan pengakuratan data aset desa*” maka ditetapkan sasaran Meningkatnya desa yang menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan pengakuratan data aset desa.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2023 sebanyak 1 ( Satu ) sasaran dengan indikator kinerja dan dengan Perjanjian Kinerja Eselon II :

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya keberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program-program yang terdapat pada urusan wajib tergambar pada pencapaian sasaran program. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator;

**A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian ( % )
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun ( IDM )	Skor IDM 0,7695	0,7591	98,64 %
		1. Skor			
		2. Persentase Jumlah Desa Mandiri	9,84 %	14,39 %	146 %
		3. Jumlah Desa mandiri	26 Desa Mandiri	38 Desa Mandiri	146 %

- ✓ Pada Tahun 2023 Ada 15 Desa Yang Mengalami Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, Dan Indeks Ketahanan Lingkungan, Sehingga Mengakibatkan Skor Indeks Desa Membangun Juga Meningkatkan Dari Maju Menjadi Mandiri , Yaitu Untuk Target Desa Mandiri Yang Berjumlah 26 Desa Mandiri Untuk Tahun 2023 Ternyata Untuk Desa Mandirinya Tercapai 38 Desa Mandiri Sehingga Persentase Kinerja Tercapai 146 % .
- ✓ Pada Tahun 2023 telah tercapai 38 Desa Mandiri dibagi jumlah seluruh Desa Sekabupaten Nganjuk (264 Desa) dikalikan 100 % sehingga tercapai Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sebanyak 14,39 %
- Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa
- 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :

- Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
  - Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
  - Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
  - Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  - Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  - Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dimasukkan ke dalam perhitungan
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



**STATUS / KRITERIA IDM DESA SE KABUPATEN NGANJUK**

**TAHUN 2022 - 2023**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Status IDM	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	NGANJUK	1. KEDUNGOWO	MAJU	MAJU
		2. BALONGPACUL	MAJU	MAJU
2	BAGOR	1. BALONGREJO	MAJU	MAJU
		2. GIRIREJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		3. PESUDUKUH	MAJU	MAJU
		4. SEKARPUTIH	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		5. BUDURAN	MAJU	MAJU
		6. NGUMPUL	MAJU	MAJU
		7. BAGOR KULON	MAJU	MAJU
		8. PETAK	MANDIRI	MANDIRI
		9. PARON	MAJU	MANDIRI
		10. KARANG TENGAH	MANDIRI	MANDIRI
		11. SELOREJO	MAJU	MAJU
		12. GANDU	MAJU	MAJU
		13. KEREPKIDUL	MAJU	MANDIRI
		14. KUTOREJO	MAJU	MANDIRI
		15. SUGIHWARAS	MAJU	MAJU
		16. GEMENGGENG	MAJU	MAJU
		17. KENDALREJO	MAJU	MAJU
		18. BANARAN KULON	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		19. BANARAN WETAN	MAJU	MAJU
3	BARON	1. SAMBIROTO	MANDIRI	MANDIRI
		2. GEBANGKEREP	MAJU	MAJU
		3. BARON	MANDIRI	MANDIRI
		4. WAUNG	MAJU	MAJU
		5. KEMLOKOLEGI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		6. KEMADUH	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		7. GARU	MAJU	MAJU
		8. JEKEK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		9. KATERBAN	MAJU	MAJU
		10. MABUNG	MAJU	MAJU
		11. JAMBI	MAJU	MAJU

<b>4</b>	<b>BERBEK</b>	1. SALAMROJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		2. CEPOKO	MAJU	MAJU
		3. MAGUAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		4. SEMARE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		5. BERBEK	MAJU	MAJU
		6. MLILIR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		7. BENDUNGREJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		<b>8. SENGKUT</b>	MANDIRI	MANDIRI
		9. NGRAWAN	BERKEMBANG	MAJU
		10. SUMBERWINDU	MAJU	MAJU
		11. KACANGAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		12. SENDANGBUMEN	MAJU	MAJU
		13. PATRANREJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		14. SUMBERURIP	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		15. BULU	MAJU	MAJU
		16. GROJOGAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		17. TIRIPAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		18. BALONGREJO	BERKEMBANG	MAJU
		19. SONOPATIK	BERKEMBANG	MAJU
<b>5</b>	<b>GONDANG</b>	1. SUMBERJO	MAJU	MAJU
		2. NGLINGGO	MAJU	MAJU
		3. MOJOSETO	MAJU	MAJU
		4. KARANGSEMI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		5. SENJAYAN	MAJU	MAJU
		6. KEDUNGGLUGU	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		7. JA'AN	BERKEMBANG	MAJU
		8. SUMBERAGUNG	BERKEMBANG	MAJU
		9. KETAWANG	MAJU	MAJU
		10. NGUNJUNG	BERKEMBANG	MAJU
		11. SANGGRAHAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		12. BALONGGEBANG	BERKEMBANG	MAJU
		13. PANDEAN	BERKEMBANG	MAJU
		14. CAMPUR	MAJU	MAJU
		<b>15. GONDANGKULON</b>	MANDIRI	MANDIRI
		16. SENGGOWAR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		17. LOSARI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>6</b>	<b>JATIKALEN</b>	1. PERNING	MAJU	MAJU
		2. NGASEM	MAJU	MAJU
		3. GONDANG WETAN	MAJU	MAJU

		4. JATIKALEN	MAJU	MAJU
		5. BEGENDENG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		6. LUMPANGKUWIK	MAJU	MAJU
		7. DAWUHAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		8. MUNUNG	MANDIRI	MANDIRI
		9. PULOWETAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		10. PULE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		11. DLURUREJO	MAJU	MAJU
7	<b>KERTOSONO</b>	1. DRENGES	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		2. JUWONO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		3. BANGSRI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		4. KALIANYAR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		5. TANJUNG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		6. NGLAWAK	MAJU	MAJU
		7. KEPUH	MANDIRI	MANDIRI
		8. TEMBARAK	MAJU	MANDIRI
		9. PELEM	BERKEMBANG	MAJU
		10. KUTOREJO	MANDIRI	MANDIRI
		11. LAMBANGKUNING	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		12. PANDANTOYO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		13. KUDU	MANDIRI	MANDIRI
8	<b>LENGKONG</b>	1. BANJARDOWO	BERKEMBANG	MAJU
		2. LENGKONG	MANDIRI	MANDIRI
		3. JEGREG	MAJU	MAJU
		4. KEDUNGMLATEN	MAJU	MAJU
		5. PRAYUNGAN	BERKEMBANG	MAJU
		6. SUMBERSONO	MAJU	MAJU
		7. BALONGASEM	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		8. SAWAHAN	MAJU	MAJU
		9. NGRINGIN	BERKEMBANG	MAJU
		10. JATIPUNGGUR	MAJU	MAJU
		11. KETANDAN	MAJU	MAJU
		12. SUMBERKEPUH	BERKEMBANG	MAJU
		13. NGEPUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		14. PINGGIR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		15. BANGLE	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		16. SUMBERMIRI	BERKEMBANG	MAJU
9	<b>LOCERET</b>	1. TANJUNGREJO	MAJU	MAJU
		2. SOMBRON	BERKEMBANG	BERKEMBANG

		3. GENJENG	BERKEMBANG	MAJU
		4. KARANGSONO	MANDIRI	MANDIRI
		5. NGEPEH	MAJU	MAJU
		6. GODEAN	MANDIRI	MANDIRI
		7. PATIHAN	MAJU	MAJU
		8. MUNGKUNG	MAJU	MAJU
		9. SEKARAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		10. LOCERET	MANDIRI	MANDIRI
		11. JATIREJO	MAJU	MAJU
		12. TEMPEL WETAN	MAJU	MANDIRI
		13. TEKENGLAGAHAN	MAJU	MAJU
		14. GEJAGAN	MAJU	MAJU
		15. CANDIREJO	BERKEMBANG	MAJU
		16. SUKOREJO	MAJU	MAJU
		17. KWAGEAN	MANDIRI	MANDIRI
		18. KENEP	MAJU	MAJU
		19. PUTUKREJO	MAJU	MANDIRI
		20. NGLABAN	MAJU	MAJU
		21. MACANAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		22. BAJULAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>10</b>	<b>NGETOS</b>	1. KUNCIR	MANDIRI	MANDIRI
		2. KEPEL	MAJU	MAJU
		3. SURU	MAJU	MAJU
		4. NGETOS	MAJU	MAJU
		5. KLODAN	MAJU	MAJU
		6. MOJODUWUR	MAJU	MAJU
		7. KWEDEN	MAJU	MAJU
		8. BLONGKO	MAJU	MAJU
		9. ORO-ORO OMBO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
<b>11</b>	<b>NGLUYU</b>	1. SUGIHWARAS	MAJU	MAJU
		2. NGLUYU	MAJU	MAJU
		3. TEMPURAN	MAJU	MAJU
		4. LENGKONG LOR	MAJU	MAJU
		5. GAMPENG	MAJU	MAJU
		6. BAJANG	MAJU	MAJU
<b>12</b>	<b>NGRONGGOT</b>	1. CENGKOK	MAJU	MANDIRI
		2. TANJUNGKALANG	MAJU	MAJU
		3. JUWET	BERKEMBANG	MAJU
		4. KELUTAN	MAJU	MAJU

		5. NGRONGGOT	MAJU	MANDIRI
		6. MOJOKENDIL	BERKEMBANG	MAJU
		7. BETET	MAJU	MANDIRI
		8. KALORAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		9. BANJARSARI	BERKEMBANG	MAJU
		10. DADAPAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		11. TRAYANG	MAJU	MAJU
		12. KALIANYAR	MAJU	MAJU
		13. KLURAHAN	BERKEMBANG	MAJU
<b>13</b>	<b>PACE</b>	1. JAMPES	BERKEMBANG	MAJU
		2. MLANDANGAN	MAJU	MAJU
		3. GONDANG	BERKEMBANG	MAJU
		4. JATIGREGES	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		5. JOHO	MAJU	MAJU
		6. SANAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		7. PACEKULON	MANDIRI	MANDIRI
		8. CERME	MAJU	MAJU
		9. BABADAN	BERKEMBANG	MAJU
		10. BATEMBAT	BERKEMBANG	MAJU
		11. BANARAN	BERKEMBANG	MAJU
		12. BODOR	BERKEMBANG	MAJU
		13. PACE WETAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		14. JETIS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		15. GEMENGGENG	BERKEMBANG	MAJU
		16. KECUBUNG	BERKEMBANG	MAJU
		17. PLOSOHARJO	MAJU	MAJU
		18. KEPANJEN	BERKEMBANG	MAJU
<b>14</b>	<b>PATIANROWO</b>	1. BUKUR	MAJU	MAJU
		2. BABADAN	MAJU	MAJU
		3. NGEPUK	MAJU	MAJU
		4. PISANG	MAJU	MAJU
		5. LESTARI	MAJU	MAJU
		6. PECUK	MAJU	MAJU
		7. PATIANROWO	MAJU	MAJU
		8. PAKUNCEN	MAJU	MAJU
		9. ROWOMARTO	MAJU	MAJU
		10. NGROMBOT	MAJU	MAJU
		11. TIRTOBINANGUN	MAJU	MAJU
<b>15</b>		1. GONDANGLEGI	MAJU	MANDIRI

	<b>PRAMBON</b>	2. SINGKALANYAR	MAJU	MAJU
		3. MOJOAGUNG	MAJU	MAJU
		4. BANDUNG	MAJU	MAJU
		5. NGLAWAK	MAJU	MAJU
		6. BALETURI	MAJU	MAJU
		7. TEGARON	MAJU	MAJU
		8. TANJUNGTANI	MANDIRI	MANDIRI
		9. SANGGRAHAN	MAJU	MAJU
		10. ROWOHARJO	MAJU	MAJU
		11. SUGIHWARAS	MAJU	MAJU
		12. WATUDANDANG	MANDIRI	MANDIRI
		13. SONO AGENG	MAJU	MAJU
		14. KURUNGREJO	MAJU	MAJU
		<b>16</b>	<b>REJOSO</b>	1. GEMPOL
2. MUNGKUNG	MAJU			MAJU
3. SETREN	BERKEMBANG			MAJU
4. SUKOREJO	BERKEMBANG			BERKEMBANG
5. SIDOKARE	MANDIRI			MANDIRI
6. MOJOREMBUN	MANDIRI			MANDIRI
7. NGADIBOYO	MAJU			MAJU
8. REJOSO	MANDIRI			MANDIRI
9. KLAGEN	MAJU			MAJU
10. JATIREJO	BERKEMBANG			MAJU
11. MLORAH	MAJU			MAJU
12. PUHKEREP	MAJU			MAJU
13. TALUN	MAJU			MAJU
14. NGANGKATAN	MAJU			MAJU
15. TALANG	MANDIRI			MANDIRI
16. BANJAREJO	BERKEMBANG			MAJU
17. SAMBIKEREP	MAJU			MAJU
18. MUSIR LOR	BERKEMBANG			MAJU
19. MUSIR KIDUL	MAJU			MAJU
20. WENGKAL	BERKEMBANG			BERKEMBANG
21. JINTEL	BERKEMBANG			MAJU
22. KEDUNGPADANG	BERKEMBANG			MAJU
23. TRITIK	BERKEMBANG			BERKEMBANG
24. BENDOASRI	BERKEMBANG			BERKEMBANG
<b>17</b>	<b>SAWAHAN</b>	1. BENDOLO	BERKEMBANG	MAJU
		2. SAWAHAN	MAJU	MAJU

		3. NGLIMAN	MAJU	MANDIRI
		4. BARENG	MAJU	MAJU
		5. SIDOREJO	MAJU	MAJU
		6. DUREN	MAJU	MANDIRI
		7. SIWALAN	MAJU	MAJU
		8. MARGOPATUT	MAJU	MAJU
		9. KEBONAGUNG	MAJU	MAJU
<b>18</b>	<b>SUKOMORO</b>	1. SUMENGKO	BERKEMBANG	MAJU
		2. BLITARAN	BERKEMBANG	MAJU
		3. KEDUNGSOKO	MAJU	MAJU
		4. NGLUDO	BERKEMBANG	MAJU
		5. BUNGUR	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		6. PEHSERUT	MAJU	MAJU
		7. NGRAMI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		8. BAGOR WETAN	BERKEMBANG	MAJU
		9. PUTREN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		10. NGRENGKET	MAJU	MANDIRI
<b>19</b>	<b>TANJUNGANOM</b>	1. KEDUNGOMBO	MAJU	MAJU
		2. SUMBERKEPUH	MAJU	MAJU
		3. WATES	MAJU	MAJU
		4. MALANGSARI	MAJU	MAJU
		5. GETAS	MAJU	MAJU
		6. SONOBEKEL	MAJU	MAJU
		7. NGADIREJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		8. BANJARANYAR	MAJU	MAJU
		9. SIDOHARJO	MAJU	MAJU
		10. KAMPUNGBARU	MAJU	MAJU
		11. JOGOMERTO	BERKEMBANG	MAJU
		12. KEDUNGREJO	MAJU	MAJU

		13. SAMBIREJO	MAJU	MAJU
		14. DEMANGAN	BERKEMBANG	MAJU
20	WILANGAN	1. SUDIMOROHARJO	MAJU	MAJU
		2. WILANGAN	MAJU	MAJU
		3. NGADIPIRO	MAJU	MANDIRI
		4. MANCON	MAJU	MAJU
		5. NGUDIKAN	MAJU	MANDIRI
		6. SOKOHARJO	MAJU	MAJU
<b>Jumlah Total</b>		<b>264 Desa</b>		



## JUMLAH DESA MANDIRI

### SEKABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 DAN 2023

No	Nama Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SUKOMORO	0	1
2	SAWAHAN	0	2
3	TANJUNGANOM	0	0
4	PACE	1	1
5	PRAMBON	2	3
6	BARON	2	2
7	PATIANROWO	0	0
8	NGLUYU	0	0
9	NGANJUK	0	0
10	BAGOR	2	5
11	WILANGAN	0	2
12	BERBEK	1	1
13	NGETOS	1	1
14	LOCERET	4	6
15	KERTOSONO	3	4
16	NGRONGGOT	0	3
17	JATIKALEN	1	1
18	GONDANG	1	1
19	REJOSO	4	4
20	LENGKONG	1	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>23</b>	<b>38</b>

Jumlah Desa Mandiri Tahun N-Jumlah Desa Mandiri (n-1)

X100 %

Jumlah Desa Mandiri (N-1 )

$$\frac{38-23}{23} \times 100\% = 65,2\%$$

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Yang Lalu

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun ( 2022, 2021 )

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM) 1.Skor 2.Persentase Jumlah Desa Mandiri 3.Jumlah Desa mandiri	0,7319 7	0,7494	0,7695	0,7319 7	0,7421	0,7591	100 %	99 %	98,64 %
			6,06 %	7,95 %	9,84 %	6,06 %	8,71 %	14,39 %	100 %	109 %	146 %
			16 Desa Mandiri	21 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	16 Desa Mandiri	23 Desa Mandiri	38 Desa Mandiri	109 %	100 %	146 %

- a. Sasaran Dinas PMD Untuk Tahun 2021 Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Dengan Target Kinerja IDM Dengan Target Skor IDM 0,73197 Dan Mendapatkan Realisasi Kinerja 0,73197 Sehingga Persentase Indikator Capaian Kinerja 100 %. Realisasi Persentase Jumlah Desa Untuk Tahun 2021 adalah 6,06% dengan Target 6,06 % Sehingga Capaian Kinerja untuk Desa Mandiri sebesar 100 %
- b. Sasaran Dinas PMD Untuk Tahun 2022 Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Dengan Target Kinerja IDM Dengan Target Skor IDM 0,7494 Dan Mendapatkan Realisasi Kinerja 0,7421 Sehingga Persentase Indikator Capaian Kinerja 99 %. Realisasi Persentase Jumlah Desa Untuk Tahun 2022 adalah 8,71 % dengan Target 7,95 % Sehingga Capaian Kinerja untuk Desa Mandiri sebesar 109 %

Pada Tahun 2022 Untuk Capaian Jumlah Desa Mandiri Tercapai 109 % Dimana Dari Target Desa mandiri 21 Desa Tercapai 23 Desa Mandiri Dan Sudah Disesuaikan Dengan Target

c. Sasaran Dinas PMD Untuk Tahun 2023 Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Dengan Target Kinerja IDM Dengan Target Skor IDM 0,7695 Dan Mendapatkan Realisasi Kinerja 0,7591 Sehingga Persentase Indikator Capaian Kinerja 98,64 %.

Realisasi Persentase Jumlah Desa Untuk Tahun 2023 adalah 14,39 Persen dengan Target 9,84 % Sehingga Capaian Kinerja untuk Desa Mandiri sebesar 146%

A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR PADA DOKUMEN RENSTRA.

TABEL 3.1.3.1

TARGET KINERJA RENSTRA

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,38	0,76	0,7320	0,7494	0,7695	0,6831	0,7079	0,7320	0,7421	0,7591	0,0114	0,0119	100 %	99 %	98,64 %
		1.Skor															
		2.Persentase Jumlah Desa Mandiri	0,37 %	0,0075 %	6,06 %	7,95 %	9,84 %	1,14 %	1,89 %	6,06 %	8,71 %	14,39 %	300 %	250 %	100 %	109 %	146 %
		3.Jumlah Desa mandiri	1 Desa Mandiri	2 Desa Mandiri	16 Desa Mandiri	21 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	3 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	16 Desa Mandiri	23 Desa Mandiri	300 %	250 %	100 %	100 %	146 %	

NB: Dinas PMD dalam Melaksanakan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sudah Sesuai Target pada RENSTRA DPMD tahun 2018 – 2023.

TABEL 3.1.3.2

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET  
AKHIR RENSTRA ( TAHUN 2023 )**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun ( IDM )	Skor IDM 0,7695	0,7591	98,64 %
		1. Skor			
		1. Persentase Jumlah Desa Mandiri	9,84 %	14,39 %	146 %
		2. Jumlah Desa mandiri	26 Desa Mandiri	38 Desa Mandiri	146 %

Pada Tahun 2023 ada 15 Desa Yang Mengalami Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks ketahanan Lingkungan ,Sehingga Mengakibatkan Skor Indeks Desa Membangun Juga Meningkatkan Dari Maju Menjadi Mandiri , Yaitu untuk Target Desa Mandiri yang berjumlah 26 Desa Mandiri untuk tahun 2023 ternyata untuk Desa Mandirinya Tercapai 38 Desa Mandiri Sehingga Persentase Kinerja tercapai 146 % .

#### A.5 ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja ( % )	Tercapai/Tidak Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun ( IDM ) 1.Skor Indeks	98,64 %	Tercapai
		2.Persentase Jumlah Desa Mandiri	146 %	Tercapai
		3.Jumlah Desa mandiri	146 %	Tercapai

- ✓ Interfensi Pembangunan Desa dilakukan terhadap Score Indeks Ketahanan yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain sehingga bisa menaikan kekurangan pada indeks ketahanan tersebut Dengan Pemutakhiran data.
- ✓ Pada Tahun 2023 Ada 15 Desa Yang Mengalami Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi( Terdiri dari Keragaman Produksi Masyarakat,Akses pusat perdagangan dan pasar,Akses Logistik, akses Perbankan dan Kredit dan keterbukaan Wilayah ), Indeks Ketahanan Sosial ( yang terdiri dari bidang Pendidikan ,Kesehatan, Modal Usaha dan Permukiman), Dan Indeks Ketahanan Lingkungan(Terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan,Bencana Alam dan Tanggap Bencana ), Sehingga Mengakibatkan Skor Indeks Desa Membangun Juga Meningkat Dari Maju Menjadi Mandiri , Yaitu Untuk Target Desa Mandiri Yang Berjumlah 26 Desa Mandiri Untuk Tahun 2023 Ternyata Untuk Desa Mandirinya Tercapai 38 Desa Mandiri Sehingga Persentase Kinerja Tercapai 146 %.
- ✓ Sasaran Dinas PMD Adalah Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Dengan Target Kinerja IDM Dengan Target Skor IDM 0,7695 Dan Mendapatkan Realisasi Kinerja 0,7591 Sehingga Persentase Indikator Capaian Kinerja 98,64 %.

## A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.1.6

### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran( %)	Tingkat Efisiensi( %)
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun ( IDM )	98,64 %	92 %	8 %
		1. Skor			
		1.Persentase Jumlah Desa Mandiri	146 %	92 %	54 %
		1. Jumlah Desa mandiri	146 %	92 %	54 %

Target Indikator Kinerja Dinas PMD Untuk Indeks Desa Mandiri ( IDM ) tahun 2023 dengan Skor 0,7695 Dengan Capaian Kinerja 98,64 % Sasaran IDM Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan diampu oleh 5 program yang ada di Dinas PMD. Dengan Pagu anggaran Rp. 11.977.945.295 Adapun Realisasi Penyerapan Anggarannya Sebesar Rp. 11.076.951.959 ( 92 % ). Capaian Kinerja Untuk Jumlah Desa Mandiri adalah 146 % Untuk Realisasi Anggaran sebesar 92 % Sehingga Tingkat Efisiensi Sebesar 54 %.

**A.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

TABEL 3.1.7  
Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
1	<u>“Meningkatkannya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan</u> “	Indeks Desa Membangun  ( IDM )			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	115%
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat waktu	100 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%



No	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	100%
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Penataan Desa	104 %
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Penataan Desa	104 %
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa Yang mendapatkan Fasilitas Kerjasama dan Pembangunan	100 %
			Fasilitas Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Kerjasama dan Pembangunan	100 %
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa .	100%
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan ,Pengawasan Administarsi Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%

No	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya di Berdayakan.	146 %
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya Diberdayakan	153 %

NB: Anggaran Berdasarkan DPPA Tahun 2023 Indikator Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023

NB :Target Indikator Kinerja Dinas PMD Untuk Indeks Desa Mandiri ( IDM ) Perdesaan diampu oleh 5 program Yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dengan Indikator Target kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Nganjuk 72 % dan dari penilaian Hasil E Sukma Yang melalui beberapa survey Kepuasan Masyarakat Dinas PMD Dengan Nilai Realisasi Kinerja 83% Maka Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dengan Capaian Kinerja Program Kegiatan 115% .
2. PROGRAM PENATAAN DESA dengan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Penataan Desa Dengan Capaian Program/Kegiatan mencapai 104 % dikarenakan Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sarprasnya sesuai Dengan jumlah Desa yang mendapatkan BKK ( Bantuan Keuangan Khusus).

3. PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA DESA Dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan Mencapai 100 %.Dimana untuk target dan Realisasi 113 Desa Sudah terealisasi untuk tahun 2023.
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dengan Indikator Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola pemerintahan Desa Dengan Capaian Program /Kegiatan Mencapai 100 % dimana target 264 Desa Sudah Mendapatkan Pembinaan dan Pemngawasan Administasi Tata Pemerintahan Desa ( Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi penyusunan RKP, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Pengelolaan aset Desa ).
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dengan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya Di Berdayakan. Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat Dengan Indikator Kinerja Persentase desa Yang Kapasitas Kelembagaanya diberdayakan mencapai 146% Dikarenakan Kurang Tepat dalam Perencanaan Target program.Dimana Pada saat Penyususnan Renstra Target Capaiannya 80 Desa Tetapi pada saat Penyusunan Renja/DPA ada Pemahaman Bahwa Target harus sama dengan Renstra Padahal target yang dicapai pada tahun 2023 lebih dari 80 Desa .

**A. REALISASI ANGGARAN**

**TABEL 3.2**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.617.302.671</b>	<b>5.021.996.265</b>	<b>595.306.406</b>	<b>89 %</b>
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.930.000</b>	<b>38.635.280</b>	<b>294.720</b>	<b>99 %</b>
<b>a.1</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.930.000	38.635.280	294.720	88 %
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.605.428.000</b>	<b>4.035.093.558</b>	<b>570.334.442</b>	<b>87 %</b>
<b>b.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.188.000	4.020.487.558	569.700.442 209.520	88 %
<b>b.2</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.120.000	4.910.480	209.520 424.480	96 %
<b>b.3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.120.000	9.695.520	424.480	96 %
<b>c</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
c.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0
c.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0
d	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	353.838.746	343.355.885	10.482.861	97 %
d.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	44.980.000	44.979.400	600	100 %
d.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.872.496	65.920.640	1.951.856	97 %
d.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1.055.000	991.440	63.560	94 %
d.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.970.000	30.000	99 %
d.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.732.000	204.298.750	-191.566.750	96 %
d.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.199.250	24.095.655	103.595	99 1 %
e	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	106.956.612	106.840.000	116.612	99,89 %
e.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan				
e.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan				
e.3.	Pengadaan Mebel	0	0	0	0

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
e.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.956.612	106.840.000	116.612	99,89 %
f	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	124.375.000	110.668.851	13.706.149	89 %
f.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.357.000	21.330.656	26.344	99,79%
f.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000	89.338.195	13.661.805	86,74%
g	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	387.774.313	387.402.691	371.622	99,90%
g.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.443.388	261.280.894	162.494	99,94 %
g.2.	Pemeliharaan Mebel	1.245.900	1.245.000	900	99,93 %
g.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.035.000	31.031.120	3.880	100 %
g.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.050.025	93.845.677	204.348	99,78 %
2,	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	117.600.000	112.818.050	4.781.950	95,93 %
a	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	117.600.000	112.818.050	4.781.950	95,93 %
a.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status	-			
a.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	33.000.000	31.677.400	1.322.600	96 %
a.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	20.000.000	18.782.850	1.217.150	94 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
a.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-			
a.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat, Kewenangan Kab/Kota	-			
a.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	64.600.000	62.357.800	2.242.200	97 %
3.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>194.835.000</b>	<b>191.125.789</b>	<b>3.709.211</b>	<b>98 %</b>
a	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	194.835.000	191.125.789	3.709.211	98 %
a.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	138.822.000	137.490.395	1.331.605	99 %
a.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	10.000.000	9.852.600	147.400	99 %
a.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	46.013.000	43.782.794	2.230.206	95 %
4.	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>5.096.057.224</b>	<b>271.450.400</b>	<b>95 %</b>
a	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>5.096.057.224</b>	<b>271.450.400</b>	<b>95 %</b>
a.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	10.000.000	9.974.000	26.000	100 %
a.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	90.000.000	84.911.500	5.088.500	94 %
a.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40.000.000	37.757.910	2.242.090	94 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
a.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.618.207.624	4.395.807.484	222.400.140	95 %
a.5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	35.000.000	26.278.950	8.721.050	75 %
a.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	128.000.000	127.239.380	760.620	99 %
a.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala desa	239.000.000	221.219.000	17.781.000	93 %
a.8	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	75.000.000	70.865.000	4.135.000	94 %
a.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20.000.000	15.460.000	4.540.000	77 %
a.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	32.300.000	32.139.000	161.000	99 %
a.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	24.482.000	5.518.000	82 %
a.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	20.000.000	19.961.000	39.000	100 %
a.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.000.000	29.962.000	38.000	100 %
5.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>680.700.000</b>	<b>654.954.631</b>	<b>25.745.369</b>	<b>96 %</b>
a	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah</b>	<b>680.700.000</b>	<b>654.954.631</b>	<b>25.745.369</b>	<b>96 %</b>



No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	<b>Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
a.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	14.819.000	181.000	99 %
a.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	136.000.000	135.196.200	803.800	99 %
a.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	37.700.000	37.417.500	282.500	99 %
a.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	29.940.320	59.680	100 %
a.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	25.000.000	23.877.600	1.122.400	96 %
a.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	437.000.000	413.704.011	23.295.989	95 %
	<b>Rata Rata Capaian Anggaran (%)</b>				<b>92 %</b>

NB : Sasaran Strategis Dinas PMD Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan yang dituangkan di Indikator Kinerja Utama Yaitu Indeks Desa Membangun ( IDM ) dengan Target Skor 0,7695 dan tercapai dengan Realisasi Kinerja 0,7591 Dengan Pagu Anggaran Rp . 11.977.945.295 dengan Realisasi anggaran Rp. 11.076.951.959 Dengan Capaian anggaran Anggaran 92 % yang Diampu Dengan 5 ( Lima ) Program Yaitu :

1. Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dengan Indikator Kinerja Program Hasil Survey/ Kepuasan Masyarakat Dengan Pagu Anggaran Rp 5.617.302.671 Dengan Realisasi Anggaran Rp. 5.021.996.265 Sehingga Penyerapan Anggaran 89 %
2. PROGRAM PENATAAN DESA dengan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Penataan Desa Dengan Pagu Anggaran Rp.117.600.000 Dan Realisasi Anggaran Rp. 112.818.050 Dengan Capaian Anggaran sebesar 95,96 %
3. PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA DESA Dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Kerjasama dan Pembangunan Dengan Pagu Anggaran Rp.194.835.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.191.125.789 sehingga Capaian Penyerapan Sebesar 98 %
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dengan Indikator Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola pemerintahan Desa Dengan Pagu Anggaran Rp. 5.367.507.624 Dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp.5.096.057.224 Sehingga Capaian Penyerapan Anggaran Sebesar 95 %.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dengan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya Di Berdayakan Dengan Pagu Anggaran Rp.680.700.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.654.954.631 Sehingga Penyerapan Anggaran mencapai 96 %

Dengan Demikian Dinas PMD untuk Tahun 2023 Untuk Rata Rata Capaian Anggaran Sebesar 92,48 % Dengan Capaian Kinerja sebesar 146 %.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu: "Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan.

### 4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas PMD dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai sasaran visi Kabupaten Nganjuk, "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho) "Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk di masa mendatang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Perlunya peningkatan kualitas SDM/ personil Dinas PMD maupun dari Desa melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- ✓ Perlunya motivasi terhadap personil pada Dinas PMD untuk melaksanakan kegiatan;
- ✓ Perlunya evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data sehingga data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan realita yang ada;
- ✓ Perlunya Kordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap pembinaan di Desa;

Nganjuk, 24 Januari 2024

  
**PUGUH HARNOTO, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750708 199602 1 001

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. PERJANJIAN KINERJA



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUGUH HARNOTO, SSTP. MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H.MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA  
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, ..... Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Nganjuk

Pihak kedua  
Plt. Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H.MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA

PUGUH HARNOTO, SSTP. MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7695 26 Desa mandiri ( 9,84 % )

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.923.991.175,-	APBD
2	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 60.000.000,-	APBD
3	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 200.000.000,-	APBD
4	MENYELENGGARAKAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 3.185.018.056,-	APBD
5	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 571.000.000,-	APBD
	JUMLAH TOTAL	Rp. 8.940.009.231,-	APBD

Pihak kedua Plt. Bupati Nganjuk

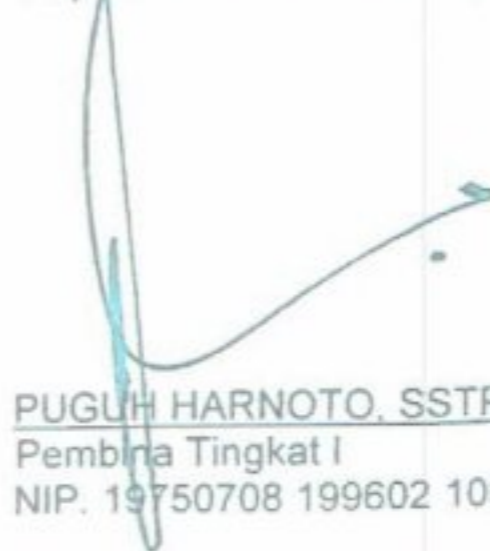


Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA

Nganjuk, ..... Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

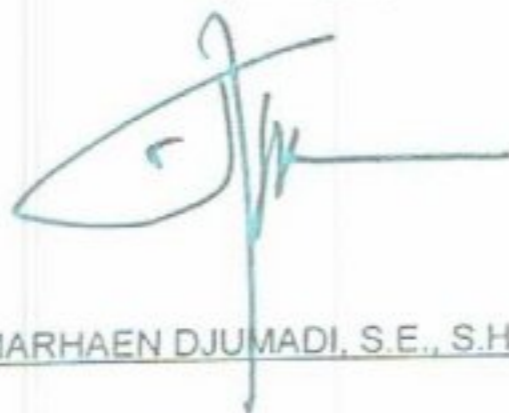


PUGUH HARNOTO, SSTP. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750708 199602 1001

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.880.000	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat	Rp. 4.191.720.000	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 317.003.250	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 96.362.000	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 288.025.925	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 60.000.000	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Rp. 200.000.000	APBD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Admministrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.185.018.056	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang sama dalam Daerah Kab/ Kota	Rp. 571.000.000	APBD

Nganjuk, ..... Januari 2023

Pihak kedua  
Plt. Bupati Nganjuk



Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA

Pihak Pertama  
Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Nganjuk



PUCUH HARNOTO, SSTP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750708 199602 1 001

### B. Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Skor / Formulasi Perhitungan Persentase Jumlah Desa Mandiri	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Realisasi Tahun				Target Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
						2019	2020	2021	2022	2023			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\text{Skor IDM rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Total IDM} : 264 (\text{Desa})}{\text{Jumlah Desa Mandiri}} \times 100\%$ Jumlah Seluruh Desa (264 Desa)	0,591574	0,6831	0,7079	0,731973	0,7494	0,7695	0,7695	0,7695	0,7695
				Penjelasan : IDM meliputi 3 unsur ( IKS , IKE dan IKL ) 1. IDM = Indeks Desa Membangun 2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial 3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 4. IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	0,38%	1,14%	1,89%	6,06%	7,95%	9,84%	9,84%	9,84%	26 Desa Mandiri
					1 Desa mandiri	3 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	16 Desa Mandiri	21 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri





Kode	Kategori	Materi	Bentuk	Kelas	Y (Berkas)					Y (Berkas)					Kategori	Keterangan				
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20			
2	13	01	2.06	06	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
2	13	01	2.06	09		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		183.782.000	0	0	0	183.782.000	212.732.000	0	0	0	0	212.732.000	28.950.000
2	13	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		24.186.250	0	0	0	24.186.250	24.199.250	0	0	0	0	24.199.250	13.000
2	13	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	106.956.612	0	0	106.956.612	106.956.612	
2	13	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		0	0	0	0	0	0	106.956.612	0	0	106.956.612	106.956.612	
2	13	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.362.000	96.362.000	0	0	0	96.362.000	124.375.000	0	0	0	124.375.000	28.013.000	
2	13	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.362.000	0	0	0	21.362.000	21.375.000	0	0	0	0	21.375.000	13.000
2	13	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	103.000.000	0	0	0	0	103.000.000	28.000.000
2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		288.025.925	288.025.925	0	0	0	288.025.925	387.774.313	0	0	0	387.774.313	99.748.388	
2	13	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.500.000	0	0	0	200.500.000	261.443.388	0	0	0	0	261.443.388	60.943.388
2	13	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.245.900	0	0	0	1.245.900	1.245.900	0	0	0	1.245.900	0	
2	13	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		22.230.000	0	0	0	22.230.000	31.035.000	0	0	0	0	31.035.000	8.805.000
2	13	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64.050.025	0	0	0	64.050.025	94.050.025	0	0	0	0	94.050.025	30.000.000
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA		60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	117.600.000	0	0	0	117.600.000	57.600.000	
2	13	02	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa		60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	117.600.000	0	0	0	117.600.000	57.600.000	

Kode	Kategori	Materi	Kegiatan	Lokasi	T (Sebelum)							T (Sesudah)							Bertambah/ (Berkurang) T+1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)					
2	13	02	2.01	02	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	13.000.000
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	44.600.000
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>			<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>194.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.835.000</b>	<b>(5.165.000)</b>	
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>			<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>194.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.835.000</b>	<b>(5.165.000)</b>	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	138.822.000	0	0	0	0	138.822.000	(5.178.000)
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000	0	0	0	0	46.000.000	46.013.000	0	0	0	0	46.013.000	13.000
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3.185.018.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.185.018.056</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>2.182.489.568</b>	
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>3.185.018.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.185.018.056</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.367.507.624</b>	<b>2.182.489.568</b>	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0



Kode	Uraian	Kategori	Kecamatan	Kategori	Kecamatan	T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)	T+1								
						10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15			16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19+20)			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19+20)	21	
2	13	05			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				571.000.000	0	0	0	571.000.000	680.700.000	0	0	0	0	680.700.000	109.700.000	
2	13	05	2.01		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				571.000.000	0	0	0	571.000.000	680.700.000	0	0	0	0	680.700.000	109.700.000	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.000.000	0	0	0	106.000.000	136.000.000	0	0	0	0	136.000.000	30.000.000	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	37.700.000	0	0	0	0	37.700.000	12.700.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	15.000.000	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		385.000.000	0	0	0	385.000.000	437.000.000	0	0	0	0	437.000.000	52.000.000	

REKAPITULASI BUDGET BERSAMA

Januari	Rp016.476.477
Februari	Rp102.079.734
Maret	Rp175.129.417
April	Rp1.237.318.621
Mei	Rp900.105.720
Juni	Rp2.668.603.392
Juli	Rp608.219.298
Agustus	Rp653.798.709
September	Rp659.433.987
Oktober	Rp1.787.470.507
November	Rp683.713.821
Desember	Rp482.593.417
Jumlah	Rp11.977.945.295



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

**Formulir E 81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mangrove Ekowisata**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2023**

No	Date	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Berbasis Perangkat Daerah/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berbasis Perangkat Daerah/d Tahun 2023 (%)	OPD (Pemerintah Kabupaten Mangrove Ekowisata)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN YANG DIUSUN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	72%	5.856.772.897	72%	5.817.302.671	79,29	1.645.151.363	81,49	1.222.821.910	83,70%	1.877.246.146	83,70%	5.011.998.265	84,98%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Keuangan Yang Diusun Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Diusun Tepat Waktu	100%	40.842.000	100%	38.938.000	11	9.160.000	11	17.076.000	11	17.076.000	100%	38.635.280	94,64%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Diusun Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPD	100%	4.484.829.000	100%	4.484.829.000	12.319.280	5.150.000	0	17.076.000	11	17.076.000	100%	38.635.280	94,64%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%	4.151.720.000	100%	4.151.720.000	464.867.865	1.451.379.134	1.089.044.769	1.056.582.090	1.056.582.090	1.056.582.090	100%	4.039.093.558	97,07%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	320 orang/bulan	4.181.400.000	320 orang/bulan	4.590.188.000	151.155.595	1.448.553.634	1.089.044.769	1.028.377.580	1.028.377.580	1.028.377.580	100%	4.020.487.558	96,15%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.120.000	2 Laporan	5.120.000	0	0	0	4.970.480	2 Laporan	4.970.480	100%	4.970.480	96,91%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	56 Laporan	5.120.000	56 Dokumen	18.120.000	1.932.000	2.419.520	22	5.342.000	75	5.342.000	133%	5.695.520	110,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Rekrutasi ASN	90%	25.900.000	90%	6.983.800	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		Perencanaan Sarana dan Prasarana Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Pegawai	1 Unit	3.400.000	1 Unit	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%









No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Rerstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rerstra Perangkat Daerah 2023)		Koalisasi Cr. Kinerja Ren. Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Trivertan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Raihan Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (j/d Pelaksana Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tight Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2023 (s))	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Kerjasama dan Pembangunan	15%	238.800.000	43%	157.973.568	5.531.347	60.827.463	31.489.103	43%	95.257.479	48%	151.115.789	46%	39.107%	14-13/5 >100%
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Kerjasama dan Pembangunan	113 Desa	285.800.000	113 Desa	187.973.568	3.521.747	60.857.463	31.489.103	113 Desa	95.257.479	113 Desa	151.115.789	113 Desa	39.107%	100%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20 Dokumen	165.800.000	20 Dokumen	134.804.056	3.521.747	60.857.463	27.598.940	5 Dokumen	54.277.567	20 Dokumen	137.893.395	20 Dokumen	99,04%	100%
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	40 Dokumen	36.800.000	20 Dokumen	10.792.000	3.521.747	60.857.463	0	0	9.852.600	40 Dokumen	9.852.600	40 Dokumen	98,59%	100%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	55.200.000	3 Dokumen	42.877.272	3.521.747	60.857.463	3.590.163	2 Dokumen	3.177.312	3 Dokumen	48.712.294	3 Dokumen	98,15%	100%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tim Kelola Pemerintahan Desa	84%	3.516.360.000	100%	3.530.154.951	867.861.852	888.031.824	2.247.237.313	100%	3.485.111.835	100%	5.096.857.224	100%	94,94%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tim Kelola Pemerintahan Desa	264 Desa	3.516.360.000	264 Desa	3.530.154.951	867.861.852	888.031.824	2.247.237.313	264 Desa	3.485.111.835	264 Desa	5.096.857.224	264 Desa	94,94%	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	44.017.000	3.243.000	5.289.000	3.242.000	4 Dokumen	1.452.000	4 Dokumen	9.924.000	4 Dokumen	99,74%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	528 Dokumen	1.401.000.000	528 Dokumen	65.529.340	3.243.000	5.289.000	1.162.000	528 Dokumen	71.113.500	528 Dokumen	84.911.500	528 Dokumen	94,35%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264 Dokumen	1.000.000.000	264 Dokumen	6.181.800	3.243.000	5.289.000	264	264 Dokumen	39.157.910	264 Dokumen	37.759.910	264 Dokumen	94,39%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	251 Dokumen	2.805.094.840	264 Desa	2.877.181.321	461.806.452	700.828.824	2.109.497.453	251 Dokumen	1.114.074.775	251 Dokumen	4.395.807.484	251 Dokumen	95,18%	100%
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	35.000.000	40 Orang	18.537.880	1.540.000	1.800.000	1.540.000	40 Orang	22.638.950	60 Orang	26.278.950	60 Orang	75,08%	100%





